

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara atau daerah tersebut (Christianto, 2013). Indonesia adalah negara yang masih tergolong negara berkembang dan kemiskinan merupakan masalah yang menjadi pusat perhatian. Pemerintah Indonesia menyadari salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja perekonomian adalah dengan cara melakukan pembangunan nasional agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menata kehidupan yang layak demi mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia.

Berbagai program dan kegiatan pembangunan telah diarahkan terutama pada pembangunan daerah, khususnya daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Pembangunan daerah tentunya harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas kebutuhan masing-masing daerah. Sasaran pembangunan nasional telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Salah satu indikator utama dalam keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin (Dermoredjo, 2003).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik selama tahun 2015 sampai tahun 2019 perkembangan kemiskinan Provinsi Sumatera Barat sudah menunjukkan adanya keberhasilan program pemerintah dalam mengupayakan penurunan jumlah penduduk miskin. Hal tersebut dibuktikan dengan penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat. Berikut disajikan

data mengenai kemiskinan menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2015 sampai tahun 2019.

Tabel 1.1
Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2019.

Wilayah	Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi Sumatera Barat	7,31	7,09	6,87	6,65	6,42
Kepulauan Mentawai	15,52	15,12	14,67	14,44	14,43
Pesisir Selatan	8,46	7,92	7,79	7,59	7,88
Kab.Solok	10,00	9,32	9,06	8,88	7,98
Sijunjung	7,87	7,60	7,35	7,11	7,04
Tanah Datar	5,82	5,68	5,56	5,32	4,66
Padang Pariaman	8,86	8,91	8,46	8,04	7,10
Agam	7,58	7,83	7,59	6,76	6,75
Lima Puluh Kota	7,65	7,59	7,15	6,99	6,97
Pasaman	8,14	7,65	7,41	7,31	7,21
Solok Selatan	7,52	7,35	7,21	7,07	7,33
Dharmasraya	7,17	7,16	6,68	6,42	6,29
Pasaman Barat	7,93	7,40	7,26	7,34	7,14
Padang	4,93	4,68	4,74	4,70	4,48
Kota Solok	4,12	3,86	3,66	3,30	3,24
Sawah Lunto	2,22	2,21	2,01	2,39	2,17
Padang Panjang	6,74	6,75	6,17	5,88	5,60
Bukittinggi	5,36	5,48	5,35	4,92	4,60
Payakumbuh	6,67	6,46	5,88	5,77	5,68
Pariaman	5,42	5,23	5,30	5,03	4,76

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Dari Tabel 1.1 di atas tampak bahwa kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2015-2019 mengalami penurunan angka kemiskinan, dimana rata-rata kemiskinan di tahun 2015 ke tahun 2019 berada pada kisaran angka 6-7 %. Pada tahun 2019 kemiskinan tertinggi di Kota dan Kabupaten Sumatera Barat adalah Kepulauan Mentawai sebesar 14,43%. Kemiskinan di Sawah Lunto sebesar 2,17% posisi terendah setelah Kota Solok dengan kemiskinan sebesar 3,24%. Dari data yang diperoleh kemiskinan di daerah kabupaten jauh lebih tinggi dari daerah perkotaan baik di tahun 2015 hingga tahun 2019 dengan jumlah penduduk di daerah kabupaten 2

kali lipat lebih banyak dari daerah perkotaan. Hal ini menandakan masih banyaknya masyarakat di Provinsi Sumatera Barat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan. Sedangkan tujuan yang paling utama dari suatu pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi membutuhkan tambahan tenaga kerja sehingga jumlah pengangguran turun dan tingkat kemiskinan akan berkurang. Menurut (Wiguna, 2013) dalam suatu proses pertumbuhan ekonomi salah satu indikator yang digunakan untuk melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara atau wilayah adalah menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui PDRB, dapat terlihat kegiatan ekonomi yang telah dilaksanakan dan dicapai oleh suatu negara atau daerah selama periode tertentu.

Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019.

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)
2015	5,53
2016	5,27
2017	5,30
2018	5,16
2019	5,05

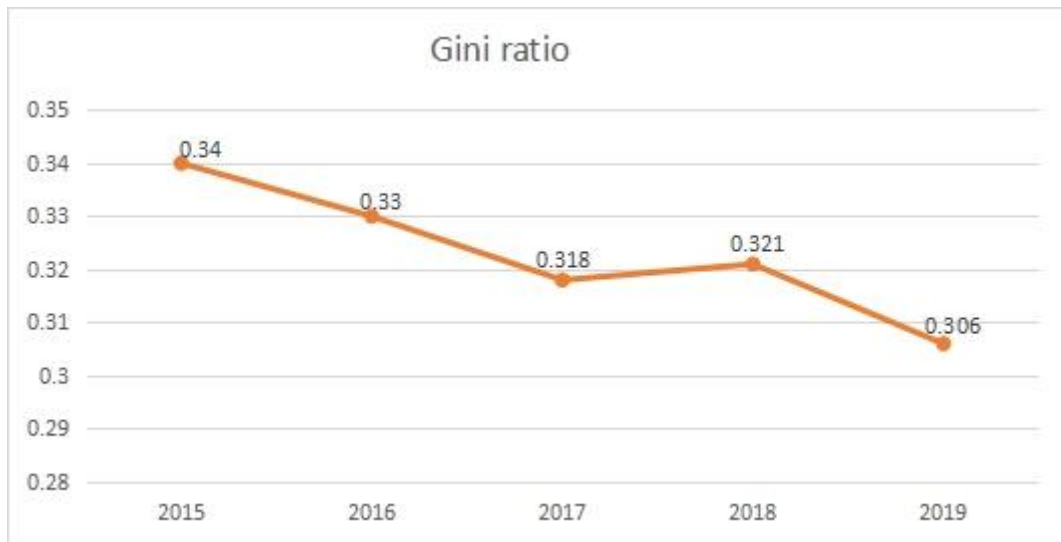
Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Dari Tabel 1.2 pertumbuhan ekonomi di hasilkan oleh perhitungan menggunakan PDRB atas harga konstan 2010. Terlihat bahwa di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 hingga 2016 laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Tetapi, pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan di bandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,30%.

Hal ini menunjukkan belum adanya pemerataan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat selama ini kesejahteraan hanya terkonsentrasi di beberapa Kota atau Kabupaten yang memiliki sentra industri atau kesejahteraan hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu dan tidak merata di antara semua kelompok masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat berfluktuasi yang berarti daerah tersebut belum memiliki kesejahteraan dan kemakmuran yang merata dan terbaik.

Selain pertumbuhan ekonomi ketimpangan pendapatan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan. Hubungan antara kesenjangan dan kemiskinan sebagai hubungan yang pragmatis, yaitu bahwa kesenjangan menyebabkan kemiskinan semakin parah atau kesenjangan adalah bentuk dari kemiskinan (Sugiyarto et al, 2015). Dalam mengukur ketimpangan pendapatan dapat menggunakan gini ratio. Gini rasio adalah satu metode untuk mengukur pemerataan pendapatan yang menunjukkan ketimpangan dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1. Semakin tinggi atau mendekati angka satu nilai gini rasio suatu daerah, menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Gambar 1.1
Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Berdasarkan gambar 1.1 merupakan gini ratio Provinsi Sumatera barat tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 sampai tahun 2017 gini ratio Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dari 0,340 poin pada tahun 2015 sampai 0,318 poin pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,321 poin.

Faktor lain yang juga mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Menurut Lundahl (2005), pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja, sehingga perlu adanya peningkatan jumlah lapangan kerja. Jika tidak, dalam jangka panjang akan menyebabkan peningkatan kemiskinan. Pengangguran memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan, sebab pengangguran sangat berpengaruh terhadap terjadinya masalah kerawanan berbagai tindak kriminal, gejolak sosial, politik dan kemiskinan (Amalia, 2012).

Tabel 1.3
Pengangguran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019.

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
2015	6,89

2016	5,09
2017	5,58
2018	5,55
2019	5,33

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Barat mengalami fluktuasi selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2015 jumlah TPT di Sumatera Barat adalah sebesar 6,89%, pada tahun 2016 turun menjadi 5,09%. Pada tahun 2017 TPT di Sumatera Barat kembali naik menjadi 5,58%.

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup atau indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.

Tabel 1.4
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019.

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (poin)
2015	69,98
2016	70,73
2017	71,24
2018	71,73
2019	72,39

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2015 hingga tahun 2019 terus mengalami kemajuan, dimana pada awalnya nilai indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat hanya 69.98 poin di tahun 2015 dan terus meningkat hingga mencapai rata-rata tertinggi pada tahun 2019 dengan rata-rata tingkat persentasenya mencapai angka 72.39 poin yang mana tergolong dalam kategori tinggi karena berada pada rentangan 70-80 poin..

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, dengan terjadinya fenomena-fenomena ekonomi di Provinsi Sumatera Barat, khususnya menyangkut pertumbuhan ekonomi yang tidak lepas dari kemiskinan, begitu pula dengan ketimpangan pendapatan, pengangguran dan indeks pembangunan manusia, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat ?
3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat ?
4. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskina di Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian:

1. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru serta menambah informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta .
2. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut masalah kemiskinan.
3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.